

Dilema Eksklusivisme di Tengah Pluralisme: Reinterpretasi *Sloka Sarasamuccaya* 35 dalam Menghadapi Fenomena Klaim Kebenaran di Indonesia

Ida Bagus Putu Adnyana^{1*}, I Wayan Nerta²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

E-mail: ibasadnyana@uhnsugriwa.ac.id¹, wayannerta@uhnsugriwa.ac.id²

Abstrak

Fenomena klaim kebenaran (*truth claim*) dan eksklusivisme beragama di Indonesia saat ini mengancam kohesi sosial dan integrasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap *Sloka 35* kitab *Sarasamuccaya* guna menemukan landasan teologis yang inklusif dalam menghadapi polarisasi identitas. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutika Gadamerian, penelitian ini mendialogkan "cakrawala teks" klasik dengan konteks sosiokultural Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusivisme dipicu oleh krisis identitas, politisasi agama, dan rendahnya literasi digital. Reinterpretasi *Sloka 35* menggeser makna *Dharma* dari identitas kelompok yang kaku menuju "Kebenaran Fungsional" universal, yang menegaskan bahwa meski cara beragama berbeda-beda, semuanya menuju pada satu muara kebenaran yang sama. Kesimpulannya, *Sarasamuccaya* menawarkan konsep inklusivisme yang memandang perbedaan sebagai kekayaan jalan menuju keadilan dan harmoni. Implikasinya, diperlukan transformasi kurikulum pendidikan agama berbasis nilai universal atau inklusif, penguatan narasi moderasi oleh tokoh agama, serta kebijakan publik yang non-diskriminatif untuk meredakan ketegangan sosial.

Kata Kunci: *dharma*; eksklusivisme; inklusivisme; klaim kebenaran; *sarasamuccaya*.

Abstract

The current phenomena of truth claims and religious exclusivism in Indonesia threaten social cohesion and national integration. This study aims to reinterpret *Sloka 35* of the *Sarasamuccaya* to identify an inclusive theological foundation for addressing identity polarization. Using a descriptive-analytical qualitative method with a Gadamerian hermeneutic approach, this study engages the "textual horizon" of the classical text in dialogue with the sociocultural context of modern Indonesia. The results indicate that exclusivism is fueled by an identity crisis, the politicization of religion, and low digital literacy. A reinterpretation of *Sloka 35* shifts the meaning of *Dharma* from a rigid group identity toward a universal "Functional Truth," affirming that although religious practices differ, they all lead to the same ultimate truth. In conclusion, the *Sarasamuccaya* offers a concept of inclusivism that views differences as a rich path toward justice and harmony. Consequently, a transformation of the religious education curriculum based on universal or inclusive values is needed, along with the reinforcement of narratives of moderation by religious leaders and non-discriminatory public policies to mitigate social tensions.

Keywords: *dharma*; exclusivism; inclusivism; truth claims; *Sarasamuccaya*.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan ruang pertemuan raksasa bagi berbagai arus keyakinan, tradisi, dan filosofi yang telah tumbuh selama berabad-abad dalam bingkai kemajemukan. Namun, realitas pluralisme ini kini menghadapi tantangan serius berupa menguatnya gejala eksklusivisme beragama yang kian mengkhawatirkan di ruang publik. Eksklusivisme ini muncul dalam bentuk klaim kebenaran mutlak yang memandang identitas kelompoknya sebagai satu-satunya pemegang otoritas teologis yang sah. Fenomena klaim kebenaran (*truth claim*) ini sering kali menjadi tembok penghalang bagi terciptanya dialog yang tulus antarumat beragama. Akibatnya, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa justru berubah menjadi pemicu fragmentasi sosial yang mengancam integrasi nasional dan kohesi masyarakat yang selama ini terjaga dengan sangat baik. Masalah utama yang menjadi fokus kajian ini adalah ketegangan yang tidak terelakkan antara teks suci yang bersifat dogmatis dengan kebutuhan akan harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Sering kali, teks-teks keagamaan ditafsirkan secara sempit dan kaku, sehingga melahirkan sikap yang menutup diri dari kebenaran yang ada pada pihak lain. Dalam konteks Indonesia, klaim bahwa “hanya kelompok kami yang benar” telah memicu berbagai tindakan intoleransi, mulai dari diskriminasi administratif hingga konflik horizontal di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya serius untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang mampu menjembatani perbedaan tersebut tanpa harus mengorbankan integritas keyakinan masing-masing individu dalam menjalankan ajaran agamanya secara totalitas.

Urgensi mengangkat masalah ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menemukan landasan teologis yang inklusif di tengah meningkatnya polarisasi identitas di Indonesia. Jika klaim kebenaran yang eksklusif dibiarkan mendominasi narasi keagamaan, maka semangat kebangsaan yang tertuang dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika akan terus tergerus oleh ego sektarian. Penelitian ini menjadi sangat relevan karena berupaya menawarkan jalan tengah melalui reinterpretasi teks klasik Nusantara yang memiliki akar sejarah kuat di tanah air. Dengan menghidupkan kembali makna filosofis dari naskah kuno, maka besar kemungkinannya untuk dapat menemukan solusi yang lebih organik dan kontekstual bagi problematika sosial-keagamaan yang sedang terjadi saat ini di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam diskursus akademik mengenai pluralisme di Indonesia, kajian selama ini cenderung didominasi oleh perspektif sosiologi politik atau teologi dari agama-agama Abrahamik secara dominan. Sementara itu, kontribusi pemikiran dari khazanah intelektual Hindu Nusantara, khususnya melalui teks *Sarasamuccaya*, masih jarang dieksplorasi secara mendalam untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti klaim kebenaran ini. Sebagian besar literatur yang ada hanya membahas *Sarasamuccaya* dalam koridor etika personal atau ritual semata, tanpa menghubungkannya dengan dinamika sosiopolitik yang lebih luas. Di sinilah artikel ini menempatkan posisinya, yaitu mengisi kekosongan literatur dengan melakukan pembacaan kritis terhadap *Sloka 35* dalam menghadapi fenomena eksklusivisme yang semakin kompleks dan menantang di Indonesia. Orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya reinterpretasi *Sloka 35 Sarasamuccaya* yang secara tradisional berbicara tentang kejayaan *Dharma* yang tidak tergoyahkan oleh siapapun. Penulis berargumen bahwa *Sloka* ini tidak boleh dipahami sebagai alat legitimasi untuk merasa paling benar atau lebih tinggi dari keyakinan orang lain di luar kelompoknya. Sebaliknya, melalui pendekatan hermeneutika, teks ini dapat dimaknai sebagai pengakuan atas kebenaran universal yang bersifat fungsional dan melampaui sekat-sekat identitas formal keagamaan yang sempit. Dengan demikian, “kemenangan *Dharma*” yang dimaksud adalah kemenangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan yang dapat ditemukan dalam setiap nafas ajaran agama manapun yang ada di bumi Nusantara ini.

Aspek penting yang dikaji dalam artikel ini meliputi analisis terhadap struktur teologis klaim kebenaran dan bagaimana *Sloka 35* memberikan kontra-narasi terhadap sikap eksklusif tersebut. Penulis bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep inklusivisme Hindu yang berakar pada tradisi lokal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan moderasi beragama di

Indonesia. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa agama tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kompas moral yang menuntun penganutnya untuk menghargai kehadiran “yang liyan” sebagai bagian dari kemuliaan ciptaan Tuhan. Keberhasilan dalam mereinterpretasi teks ini akan menjadi sumbangan berharga bagi khazanah intelektual keagamaan yang lebih terbuka dan dialogis di masa depan. Secara lebih spesifik, artikel ini ingin menunjukkan bahwa masalah klaim kebenaran bukan sekadar isu teologis di atas kertas, melainkan masalah eksistensial bagi keberlangsungan bangsa. Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman baru bagi para pendidik agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda mengenai pentingnya membaca teks suci dengan kacamata kemanusiaan. Kontribusi keilmuan yang ditawarkan adalah model hermeneutika “*Dharma Universal*” yang diharapkan mampu meredakan ketegangan identitas di ruang digital maupun nyata. Dengan mengembalikan esensi agama pada fungsi transformatifnya yang memuliakan manusia, kita dapat membangun fondasi sosial yang lebih resilien terhadap provokasi kebencian yang sering kali menggunakan jubah kebenaran mutlak.

Metodologi yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada studi teks melalui pendekatan hermeneutika Gadamerian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani jarak waktu antara teks *Sarasamuccaya* yang ditulis pada masa lampau dengan konteks sosiokultural Indonesia modern saat ini. Penulis melakukan dialektika antara “cakrawala teks” dan “cakrawala pembaca” untuk menghasilkan makna yang segar dan aplikatif. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya memaparkan isi teks secara literal, tetapi juga membongkar prasangka dan makna tersembunyi yang relevan dengan isu pluralisme guna menemukan titik temu antara tradisi kuno dan realitas kekinian yang serba dinamis. Proses pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam terhadap sumber primer, yakni *Sloka 35* dalam kitab *Sarasamuccaya* beserta ulasannya dalam tradisi Jawa-Bali. Data sekunder diperoleh dari literatur tentang teori pluralisme, laporan fenomena intoleransi di Indonesia, serta artikel ilmiah yang relevan dengan diskursus klaim kebenaran. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis konten yang kemudian disintesis menggunakan perspektif inklusivisme beragama. Melalui prosedur ini, data yang terkumpul tidak hanya diolah secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan data lapangan mengenai perilaku keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan analisis yang tajam, objektif, serta memiliki landasan teoretis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, latar belakang ini menegaskan bahwa reinterpretasi *Sloka 35 Sarasamuccaya* adalah sebuah keniscayaan intelektual di tengah krisis toleransi yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Melalui tulisan ini, penulis berupaya membuktikan bahwa kearifan masa lalu tetap memiliki daya hidup untuk menjawab tantangan masa depan jika dibaca dengan semangat yang tepat. Kajian ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi diskusi-diskusi selanjutnya mengenai pentingnya dekonstruksi klaim kebenaran demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan damai. Dengan demikian, agama tetap menjadi obor penerang yang menyejukkan bagi semua makhluk, sejalan dengan prinsip *Vasudhaiva Kutumbakam* bahwa seluruh dunia ini sesungguhnya adalah satu keluarga besar yang harus saling mengasihi.

2. Hasil Penelitian

2.1. Anatomi Eksklusivisme dan Klaim Kebenaran di Indonesia

Fenomena klaim kebenaran (*truth claim*) di Indonesia saat ini tidak lagi sekadar manifestasi keyakinan privat, melainkan telah bertransformasi menjadi komoditas identitas di ruang publik, sejalan dengan menguatnya nasionalisme religius yang konservatif dan “*godly nationalism*” yang mensyaratkan kesalehan sebagai syarat kewargaan penuh (Bourchier, 2019). Karakteristik utama dari fenomena ini adalah munculnya sikap absolutisme keagamaan yang memandang bahwa hanya penafsiran kelompoknyalah yang merepresentasikan kehendak Tuhan secara murni. Pola serupa tampak dalam gerakan populisme keagamaan yang membelah masyarakat menjadi “umat saleh” versus “musuh agama”, yang terjadi pada hampir seluruh agama (Barton et al., 2021). Klaim ini sering kali bersifat tertutup dan menolak dialektika dengan perspektif lain, sehingga menciptakan dikotomi tajam antara “kami” yang selamat dan “mereka” yang sesat. Dalam dinamika sosial-keagamaan di Indonesia, klaim kebenaran ini tidak hanya menyorot perbedaan antaragama, tetapi juga menyorot perbedaan internal dalam satu agama, yang memicu fragmentasi sosial lebih dalam di tengah masyarakat yang heterogen (Pedersen, 2016). Karakteristik kedua yang menonjol adalah politisasi klaim kebenaran untuk kepentingan kekuasaan dan pengaruh elektoral, sebagaimana tampak dalam Aksi Bela Islam, Pilkada Jakarta 2017, dan berbagai pilkada/pilpres yang menjadikan isu penodaan agama dan “pemimpin seiman” sebagai senjata politik (Bourchier, 2019; Susanto, 2019; Sembiring et al., 2023). Kebenaran teologis sering kali dipinjam untuk melegitimasi agenda politik tertentu, yang kemudian menciptakan polarisasi ekstrem di tingkat akar rumput dan memunculkan “tirani mayoritas” atas hak-hak minoritas. Fenomena ini diperparah oleh penggunaan narasi “ancaman” terhadap agama, di mana kelompok lain digambarkan sebagai musuh yang harus dipinggirkan demi menjaga kemurnian ajaran. Akibatnya, ruang dialog yang dulunya inklusif kini dipenuhi oleh retorika yang saling menegasi. Klaim kebenaran ini pun menjadi instrumen untuk meneguhkan dominasi mayoritas atau bentuk perlawanan minoritas yang defensif, yang keduanya sama-sama berpotensi merusak sendi-sendi kebangsaan dan semangat toleransi yang telah lama dibangun (Nasution et al., 2024).

Selanjutnya, karakteristik klaim kebenaran di Indonesia kontemporer sangat dipengaruhi oleh digitalisasi agama atau “otoritas keagamaan instan” di media sosial. Riset tentang *mediatization* dan “*digital religion*” menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang produktif bagi populisme religius dan renegotiasi otoritas keagamaan, memunculkan figur-figur populer yang menyaingi otoritas tradisional (Solahudin & Fakhruroji, 2019; Sito & Hakiem, 2025). Algoritma media sosial cenderung menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang memperkuat bias konfirmasi, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan eksklusifnya, kajian literasi digital keagamaan menunjukkan ketergantungan tinggi pada konten agama daring tanpa selalu diimbangi kemampuan verifikasi sumber (Ashari et al., 2023). Dalam ruang digital ini, kompleksitas ajaran agama sering kali direduksi menjadi slogan-slogan hitam-putih yang mudah dipahami namun dangkal secara esensi, sehingga praktik belajar agama bergeser ke bentuk populisme religius yang emosional dan simplifikatif (Solahudin & Fakhruroji, 2019). Hal ini mengakibatkan hilangnya tradisi berpikir kritis dan apresiasi terhadap ambiguitas penafsiran. Pemahaman yang serba instan ini mempercepat penyebaran eksklusivisme, karena kebenaran tidak lagi dicari melalui perenungan mendalam, melainkan melalui jumlah “suka” dan “bagikan” di platform digital. Pergeseran dari kesadaran pluralis menuju sikap eksklusif dipicu oleh faktor ketidakpastian global yang menimbulkan kecemasan eksistensial bagi banyak kelompok masyarakat. Dalam kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, agama sering kali dijadikan sebagai pelarian untuk mendapatkan kepastian mutlak yang kaku. Sikap eksklusif menawarkan struktur dan identitas yang jelas di tengah dunia yang cair dan penuh ketidakpastian. Ketika individu merasa terancam secara identitas atau ekonomi, mereka cenderung mencari perlindungan dalam kelompok yang menawarkan klaim kebenaran tunggal yang menjanjikan keselamatan lahir dan batin. Inilah yang menjadi akar psikologis mengapa pluralisme yang menghargai keberagaman mulai ditinggalkan dan digantikan oleh eksklusivisme yang menawarkan rasa aman semu namun memecah belah.

Faktor penyebab lainnya adalah kegagalan institusi pendidikan dan keluarga dalam menanamkan literasi keagamaan yang bersifat kritis dan inklusif. Kajian tentang pendidikan agama di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum agama yang dogmatis dan tersegregasi antaragama justru memperkuat konservatisme dan eksklusivisme, karena siswa hanya belajar agamanya sendiri tanpa mengenal tradisi lain secara mendalam (Sofjan, 2020). Pendidikan agama di banyak tempat masih terjebak pada metode indoktrinasi yang menekankan aspek formalistik-legalistik daripada aspek esensial-humanistik. Ketika peserta didik hanya diajarkan untuk menghafal dogma tanpa memahami konteks historis dan filosofis dari sebuah ajaran, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang gagap dalam menghadapi perbedaan. Tanpa adanya kemampuan untuk melakukan perbandingan agama secara objektif atau memahami keragaman mazhab, individu akan dengan mudah menganggap bahwa kebenaran adalah milik tunggal kelompoknya. Kehampaan intelektual inilah yang kemudian diisi oleh narasi-narasi eksklusif yang sering kali datang dari sumber yang tidak otoritatif namun sangat aktif di ruang digital (Solahudin & Fakhruroji, 2019). Selain itu, ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial juga menjadi bahan bakar bagi menguatnya sikap eksklusif di Indonesia. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan secara ekonomi atau politik sering kali menggunakan sentimen keagamaan sebagai alat perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dalam narasi mereka, kemiskinan dan ketidakadilan dipandang sebagai akibat dari pengabaian terhadap ajaran agama yang “murni”. Dengan demikian, klaim kebenaran menjadi sebuah bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni global atau elite lokal (Susanto, 2019). Eksklusivisme di sini bukan hanya masalah teologis, melainkan juga masalah sosiologis di mana identitas agama digunakan untuk membentengi diri dari pengaruh luar yang dianggap merusak moralitas dan kesejahteraan kelompok mereka secara sistematis.

Secara faktual, intoleransi di ruang publik di Indonesia sering kali bermuara pada aksi-aksi persekusi, penolakan rumah ibadah, hingga diskriminasi dalam kebijakan publik tingkat daerah. Studi tentang kebijakan keagamaan dan kasus-kasus seperti penolakan gereja, Ahmadiyah, maupun komunitas kepercayaan menunjukkan bagaimana tekanan kelompok eksklusif dapat mempengaruhi regulasi dan praktik administratif negara (Nasution et al., 2024; Butt, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa klaim kebenaran telah merambah ke wilayah kebijakan yang seharusnya bersifat netral dan inklusif. Peraturan daerah yang bernuansa diskriminatif sering kali lahir dari tekanan kelompok-kelompok eksklusif yang merasa memiliki hak istimewa atas kebenaran teologis di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan warga negara kelas dua bagi mereka yang tidak sejalan dengan narasi mayoritas. Realitas ini mencerminkan adanya erosi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa, di mana ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama justru disekat oleh klaim-klaim primordial. Penguatan sikap eksklusif ini juga merupakan dampak dari transnasionalisme ideologi keagamaan yang masuk ke Indonesia tanpa melalui proses filtrasi budaya yang memadai. Ideologi-ideologi yang lahir dari konflik di luar negeri dibawa masuk ke dalam konteks lokal Indonesia, mengabaikan tradisi kearifan lokal Nusantara yang secara historis sangat adaptif dan sinkretis. Budaya “ngaji” atau diskusi mendalam yang menghargai perbedaan pendapat mulai digantikan oleh model kepatuhan buta terhadap figur otoritas tertentu yang memperoleh legitimasi melalui popularitas digital (Solahudin & Fakhruroji, 2019; Sito & Hakiem, 2025). Masuknya paham-paham ini merusak tatanan kohesi sosial karena mereka sering kali mengusung misi purifikasi yang ekstrem, yang memandang tradisi lokal yang pluralis sebagai penyimpangan yang harus dibersihkan demi mencapai standar kebenaran universal versi kelompok mereka sendiri.

Analisis ilmiah menunjukkan bahwa ketika klaim kebenaran berubah menjadi ideologi yang hegemonik, maka empati sosial terhadap penderitaan orang lain yang berbeda keyakinan akan menurun drastis. Penurunan empati ini adalah prasyarat terjadinya konflik horizontal, karena “liyan” tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia, melainkan sebagai objek yang harus dikonversi atau disingkirkan. Di sinilah letak bahaya laten dari eksklusivisme, yakni mampu mematikan nalar kemanusiaan demi ambisi teologis yang sempit. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan dalam harmoni bisa seketika terbelah hanya karena provokasi klaim kebenaran yang dimainkan secara

masif. Oleh karena itu, membedah anatomi eksklusivisme ini menjadi langkah awal yang krusial sebelum menawarkan solusi melalui reinterpretasi teks-teks suci. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, anatomi eksklusivisme di Indonesia saat ini merupakan perpaduan antara krisis identitas, politisasi agama, dan rendahnya literasi kritis di era digital. Fenomena klaim kebenaran telah bergeser dari ranah privat ke ranah publik dengan cara yang agresif, yang pada gilirannya mengancam masa depan demokrasi dan pluralisme Indonesia. Diperlukan sebuah upaya dekonstruksi terhadap narasi-narasi absolut ini dengan menghadirkan kembali diskursus keagamaan yang lebih ramah dan terbuka. Melalui pemahaman yang tajam terhadap akar masalah ini, kita dapat melihat urgensi mengapa reinterpretasi terhadap teks seperti *Sloka 35 Sarasamuccaya* menjadi relevan, yaitu sebagai *counter-discourse* untuk mengembalikan agama pada fungsi aslinya sebagai jalan pembebasan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia.

2.2. Eksegesis dan Makna Tekstual Sloka 35 *Sarasamuccaya*

Teks:

*Ekam yadi bhavecchastram śreyo nissamcayam bhavet'
bahutvadiha śastranam guham creyah praveṣitam.
Yan tunggala kēta Sang Hyang Agama, tan sangcaya ngwang irikang sinanggah ayu,
swargāpawargaphala, akweh mara sira, kapwa dudū paksanira sowang-sowang hetuning
wulangun, tan anggah ring anggēhakēna, hana ring guhāgahwara, sira sang hyang hayu.
(Sarasamuccaya, 35)*

Terjemahan:

Sesungguhnya hanya satu tujuan agama; mestinya tidak sangsi lagi orang tentang yang disebut kebenaran, yang dapat membawa ke sorga atau moksa, semua menuju kepadanya, akan tetapi masing-masing berbeda-beda caranya, disebabkan oleh kebingungan, sehingga yang tidak sadar dibenarkan; ada yang menyangka, bahwa di dalam gua yang besarlah tempatnya kebenaran itu (Kajeng et al., 1999).

Sloka 35 dalam kitab *Sarasamuccaya* merupakan pilar fundamental etika Hindu Nusantara yang menegaskan posisi sentral *Dharma* dalam kehidupan manusia, yakni sebagai kebenaran universal yang berlaku di mana-mana dan tidak terikat ruang dan waktu (Wisarja et al., 2022). Secara tekstual, *sloka* ini dibuka dengan kalimat Sanskerta "*Ekam yadi bhavecchastram śreyo nissamcayam bhavet*", yang menekankan bahwa seandainya hanya ada satu ajaran suci, maka tidak akan ada keraguan dalam diri manusia mengenai hakikat kebaikan sejati. Penulis teks Jawa Kuno mempertegas esensi tersebut melalui ungkapan "*Yan tunggala kēta Sang Hyang Agama*", yang mengisyaratkan bahwa pada level transenden, seluruh ajaran suci memiliki muara yang sama. Struktur bahasa Jawa Kuno yang digunakan menunjukkan penekanan sangat kuat pada sifat absolut dari kebajikan sebagai tujuan akhir yang menyatukan seluruh umat manusia. Penafsiran mendalam terhadap *sloka* ini menyatakan bahwa *Dharma* atau kebenaran universal tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Keberadaan *Dharma* dipandang sebagai hukum kodrat yang bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada pengakuan manusia secara formalistik. Metafora yang mungkin sangat menarik untuk merepresentasikan ini yakni membandingkan *Dharma* dengan aliran sungai yang mengalir menuju samudra luas. Sebagaimana air sungai yang tidak dapat dibendung secara permanen oleh kekuatan manusia, demikian pula kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Simbol air menunjukkan bahwa *Dharma* bersifat cair, adaptif, namun memiliki kekuatan penghancur terhadap penghalang-penghalangnya, memberikan pesan bahwa kebajikan tidak memerlukan pembelaan agresif atau klaim yang berisik.

Dalam tradisi intelektual Hindu, *Sarasamuccaya* merupakan gubahan *Mahabharata* yang dikompilasi agar relevan dengan karakter masyarakat Nusantara dan digolongkan sebagai *Smṛti* yang memuat nilai-nilai universal tentang manusia, kesetaraan, tujuan hidup, serta tata cara hidup yang benar (Wisarja et al., 2022; Gara, 2020). *Sloka* 35 menonjolkan aspek kemenangan kebenaran atau *Satyam Eva Jayate* sebagai sebuah kepastian teologis yang mutlak. Namun, penting dicatat bahwa teks ini menggunakan terminologi *Dharma*, bukan agama tertentu. Perbedaan ini sangat krusial dalam kajian eksegesis, karena *Dharma* mencakup spektrum luas melampaui institusi agama formal. *Dharma* merujuk pada tatanan kosmik dan kebenaran universal yang melekat pada setiap makhluk hidup tanpa memandang latar belakang teologis, sejalan dengan uraian bahwa *Dharma* adalah pengetahuan, budaya, keberuntungan, keselamatan, dan bahkan “memberikan keabadian” (Wisarja et al., 2022). Keselarasan tindakan dengan prinsip kebajikan inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan manusia dalam mencapai tujuan hidup yang disebut dengan istilah *kasidan* (terpenuhi maksudnya/selesai dengan baik). Realitas manusiawi yang penuh kemajemukan sering kali terjebak dalam kebingungan, sebagaimana digambarkan dalam frasa “*bahutvadiha śāstranam guham creyah praveṣitam*”. Banyaknya ajaran dan perbedaan cara atau *kapwa dudū paksanira sowang-sowang* sering kali menjadi *hetuning wulangun* atau penyebab kesesatan pikir. Metafora kebingungan ini menjelaskan akar psikologis munculnya klaim kebenaran eksklusif di masyarakat. Manusia sering kali gagal melihat *Sang Hyang Hayu* karena terperangkap dalam ego sektarian yang sempit. Kebenaran sejati seolah tersembunyi “*ring guhāgahwara*” atau dalam gua yang gelap, bukan karena kebenaran itu sengaja menyembunyikan diri, melainkan karena keterbatasan persepsi manusia yang menganggap kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri di dalam batas gua pemikiran mereka.

Analisis linguistik terhadap kata *kasidan* dalam *sloka* ini merujuk pada hasil akhir perbuatan yang selaras dengan hukum alam. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebenaran diukur dari dampaknya, bukan sekadar pengakuan lisan atau formalitas belaka, sejalan dengan ajaran etika *Sarasamuccaya* bahwa hidup baik di dunia menentukan kebahagiaan di akhirat dan kelahiran berikutnya (Gara, 2020). Sebuah tindakan disebut benar jika menghasilkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi lingkungannya secara nyata. Oleh karena itu, klaim kebenaran yang bersifat merusak atau menimbulkan perpecahan sebenarnya sedang melawan arus *Dharma* itu sendiri. Dalam perspektif eksegetis, *Sloka* 35 menjadi kritik tajam bagi siapa saja yang menggunakan nama Tuhan untuk melakukan penindasan. Tindakan destruktif tersebut secara otomatis akan menemui kegagalannya sendiri menurut hukum *Dharma* yang bersifat transenden dan tidak dapat dimanipulasi kepentingan. Penekanan pada sifat *Dharma* yang tidak ditanam namun tumbuh, atau *yadyapin dudu tinamanan*, mengindikasikan bahwa kebenaran bersifat intuitif dalam nurani manusia. Ia tidak memerlukan indoktrinasi memaksa untuk dikenali sebagai sebuah kebaikan sejati. Teks *Sarasamuccaya* mengakui adanya cahaya kebenaran universal di dalam diri setiap insan tanpa kecuali. Jika kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh secara alami, maka upaya menyeragamkan pemikiran atau memaksakan satu bentuk “tanaman” kebenaran kepada orang lain adalah tindakan menyalahi kodrat. Pemahaman ini sangat penting untuk meruntuhkan tembok eksklusivisme yang menganggap kebenaran hanya tumbuh di lahan kelompoknya sendiri, padahal kebenaran adalah milik semesta yang bebas tumbuh di mana pun kebajikan ditegakkan.

Dalam struktur naratifnya, *Sloka* 35 diposisikan sebagai penguat mental bagi individu yang berjuang di jalan kebajikan meski menghadapi tantangan besar. Teks ini berfungsi sebagai pelipur lara sekaligus motivasi bahwa kejujuran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia dalam pandangan kosmik, selaras dengan fungsi etika *Sarasamuccaya* sebagai pedoman hidup baik (*dharma, artha, kama, moksa*) (Gara, 2020). Namun, dalam sejarah penafsirannya sering terjadi distorsi di mana *sloka* ini dijadikan jargon untuk merasa paling benar sendiri. Padahal, jika ditelaah objektif, teks ini tidak membicarakan kemenangan kelompok atas kelompok lain, melainkan kemenangan nilai atas kebatilan. Distorsi makna inilah yang menjadi celah masuknya sikap eksklusif yang memicu ketegangan. *Dharma* seharusnya dipahami sebagai perlindungan bagi martabat jiwa yang tetap teguh dalam kebenaran

tanpa perlu merasa superior. Eksegesis terhadap *sloka* ini juga mengungkap bahwa *Dharma* memiliki dimensi perlindungan bagi mereka yang menjaganya, sesuai prinsip *Dharmo Rakshati Rakshitah*, yang sejalan dengan gagasan bahwa *Dharma* menuntun manusia menuju “akhir penderitaan” dan kedamaian (Wisarja et al., 2022). Perlindungan ini bukan bersifat fisik ajaib, melainkan perlindungan martabat dan integritas jiwa dari kehancuran moral. Ketika seseorang bertindak benar, ia memiliki ketenangan batin yang tidak bisa digoyahkan tekanan eksternal maupun perbedaan pendapat. Dalam konteks pluralisme, pemahaman ini mendorong seseorang tetap toleran karena yakin kebenarannya tidak akan hilang hanya karena orang lain memilih jalan berbeda. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi perdamaian, di mana setiap individu merasa aman dengan keyakinannya tanpa harus meniadakan eksistensi liyan yang juga mencari jalan menuju muara kebenaran yang sama.

Secara filosofis, *Sloka 35* mengandung ajaran tentang detasemen atau ketidakterikatan terhadap hasil akhir duniawi yang sering kali memicu konflik kepentingan. Kemenangan *Dharma* adalah kemenangan jangka panjang yang melampaui usia biologis manusia dan kepentingan politik sesaat. Hal ini mengajarkan kesabaran intelektual dan spiritual dalam menghadapi ketidakadilan yang mungkin terjadi di dunia. Penafsir teks harus melihat bahwa “tidak terkalahkan” berarti kebenaran tetap tegak sebagai standar moral meski diabaikan banyak orang. *Sloka* ini menuntut konsistensi etis dari penganutnya untuk tetap berada di jalan kebajikan. Seseorang yang memahami *Sloka 35* tidak akan terancam oleh keberadaan agama lain, karena ia tahu esensi kebajikan tetap utuh tak tergoyahkan. Sebagai penutup bagian eksegetis ini, *Sloka 35 Sarasamuccaya* harus dibaca sebagai manifesto kemanusiaan berbasis hukum universal yang sangat inklusif. Teks ini merupakan panggilan untuk kembali pada esensi perbuatan, bukan sekadar klaim identitas yang memecah belah. Makna tekstualnya tentang satu tujuan di tengah banyak cara memberikan harapan bagi tegaknya keadilan dan harmoni di Indonesia. Memahami bahwa *Sang Hyang Hayu* dapat dicapai melalui berbagai cara mengharuskan kita menanggalkan sikap eksklusif yang sempit. Pemahaman teks klasik ini menjadi modal berharga untuk memandang perbedaan sebagai kekayaan jalan menuju satu kebenaran. Dengan demikian, *Sarasamuccaya* benar-benar menjadi solusi hidup yang relevan untuk menghadapi tantangan klaim kebenaran di tengah pluralisme bangsa Indonesia.

2.3. Reinterpretasi Hermeneutis: Dari Eksklusivisme ke Inklusivisme

Reinterpretasi terhadap *Sloka 35 Sarasamuccaya* dimulai dengan melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman “kemenangan *Dharma*” yang selama ini sering kali disempitkan menjadi sekadar kemenangan identitas kelompok (Nendissa et al., 2024; Manno, 2025). Dalam konteks Indonesia yang plural, hermeneutika inklusif menuntut kita untuk menggeser makna *Dharma* dari kategori teologis yang eksklusif menuju kategori etis yang universal. Jika selama ini *Dharma* hanya dipahami sebagai ajaran Hindu secara institusional, maka dalam pembacaan baru ini, *Dharma* diposisikan sebagai sebuah “Kebenaran Fungsional”. Artinya, setiap nilai yang mendatangkan kemaslahatan, keadilan, dan kedamaian bagi kemanusiaan adalah *Dharma* itu sendiri, terlepas dari label formal agama apa pun yang membungkusnya secara lahiriah bagi para penganutnya. Dengan demikian, *sloka* ini tidak lagi menjadi alat untuk memisahkan antara “kita” dan “mereka”, melainkan menjadi titik temu kebajikan bagi seluruh umat manusia. Langkah hermeneutis selanjutnya adalah menafsirkan frasa “tidak dapat dikalahkan oleh siapapun” sebagai ketangguhan nilai kemanusiaan atas egoisme sektarian yang sempit. Dalam masyarakat yang majemuk, klaim kebenaran sering kali muncul dari rasa takut akan kehilangan eksistensi diri. Reinterpretasi ini menawarkan perspektif bahwa kebenaran sejati tidak memerlukan perlindungan yang bersifat agresif atau diskriminatif terhadap pihak lain. Jika seseorang meyakini bahwa *Dharma* adalah air sungai yang tak terbendung, maka ia tidak akan merasa terancam oleh aliran sungai lain.

Sikap inklusif lahir ketika kita menyadari bahwa kemenangan kebenaran bukan berarti kekalahan bagi pemeluk agama lain, melainkan kekalahan bagi kebencian dan ketidakadilan di dalam diri. Dalam kerangka hermeneutika Gadamerian, kita harus mempertemukan cakrawala teks abad ke-9 dengan

cakrawala Indonesia abad ke-21 yang menghadapi krisis toleransi (Nendissa et al., 2024). Penafsiran ulang ini menegaskan bahwa *Sloka 35* adalah bentuk "Pluralisme Teologis" yang mengakui bahwa kebenaran bisa mewujud dalam berbagai rupa dan nama. Reinterpretasi ini menolak logika *zero-sum game* dalam beragama, di mana kemenangan satu pihak harus berarti kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, sloka ini dimaknai sebagai jaminan bahwa integritas moral adalah jalan menuju kebenaran yang mutlak. Pandangan ini meruntuhkan dinding eksklusivisme karena ia memberikan ruang bagi "kebenaran liyan" untuk diakui sebagai bagian dari orkestra kebajikan yang sama (Kristianto, 2022). Reinterpretasi ini juga menyentuh aspek relasi kuasa dalam klaim kebenaran. Sering kali, pihak yang merasa "paling benar" menggunakan teks suci untuk menjustifikasi dominasi mereka atas kelompok minoritas. Namun, melalui pembacaan yang kritis, kita melihat bahwa *Dharma* justru berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat atau banyak. Reinterpretasi ini membawa pesan bahwa mayoritas secara numerik tidak otomatis memegang otoritas tunggal atas kebenaran. Kebenaran dalam *Sarasamuccaya* bersifat substansial, bukan prosedural, sehingga memperkuat moderasi beragama di Indonesia yang sangat majemuk.

Aspek "ketidakterkalahkan" dalam *Sloka 35* harus dipahami secara eskatologis dan sosiologis sebagai kemenangan nurani atas nafsu kekuasaan. Dalam konteks fenomena klaim kebenaran, reinterpretasi ini mengajak umat kembali pada keheningan batin daripada keriuhan retorika. Kebenaran yang sejati tidak membutuhkan validasi berupa pujian atau pengakuan massal yang sering kali semu. Dengan memahami bahwa *Dharma* akan menang dengan sendirinya, seorang penganut agama akan memiliki "kesabaran teologis" untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain (Barus & Sinaga, 2025). Inilah esensi dari transisi menuju inklusivisme, yakni sebuah keyakinan yang kokoh di dalam, namun sangat lentur dan menghargai di luar, menciptakan harmoni tanpa harus menanggalkan identitas keyakinan. Lebih jauh, reinterpretasi ini memandang *Sloka 35* sebagai basis bagi "Etika Global" yang relevan dengan masalah faktual di Indonesia seperti ketidakadilan sosial. Jika *Dharma* adalah kebenaran yang tak terbandung, maka perjuangan melawan ketidakadilan sosial adalah perwujudan nyata dari mengalirkan sungai *Dharma* tersebut. Klaim kebenaran seharusnya dialihkan dari perdebatan dogmatis yang kering menuju kompetisi dalam berbuat kebajikan. Reinterpretasi ini mengubah paradigma umat beragama di Indonesia dari "merasa benar sendiri" menjadi "berlomba-lomba dalam kebenaran". Hal ini akan menciptakan atmosfer sosial yang jauh lebih sehat, di mana setiap pemeluk agama merasa bangga karena penganutnya paling banyak berkontribusi secara nyata bagi kemanusiaan universal.

Dialog hermeneutis ini juga menjawab dilema eksklusivisme dengan menawarkan konsep "Kebenaran Partisipatif". Setiap agama di Indonesia dipandang sebagai pihak yang berpartisipasi dalam mengungkapkan wajah Tuhan yang satu melalui cara yang beragam. *Sloka 35* memberikan keyakinan bahwa partisipasi dalam kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Dengan reinterpretasi ini, umat Hindu dan umat agama lainnya dapat melihat satu sama lain sebagai rekan seperjalanan dalam menjaga *Dharma* bangsa, bukan sebagai kompetitor dalam memperebutkan surga. Penafsiran inklusif ini menjadi antitesis bagi gerakan radikalisme yang sering memutus rantai kemanusiaan demi ambisi kebenaran tunggal yang kaku dan tertutup dari dialog konstruktif dengan realitas sosial yang ada. Pentingnya reinterpretasi ini juga terletak pada upaya pbumihian ajaran suci ke dalam konteks kebangsaan. *Sloka 35* yang dimaknai secara inklusif akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Ketuhanan yang dijalankan di Indonesia adalah Ketuhanan yang berkebudayaan dan saling menghargai. Dengan membaca *Sarasamuccaya* melalui kacamata inklusivisme, umat Hindu di Indonesia memberikan kontribusi intelektual bagi penguatan ideologi negara. Kebenaran yang tak terkalahkan dalam *sloka* tersebut adalah kebenaran yang memanusiakan manusia. Reinterpretasi ini menutup celah bagi pihak yang ingin membenturkan ajaran agama dengan nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat posisi teks klasik sebagai sumber inspirasi moral yang dinamis bagi zaman.

Secara metodologis, reinterpretasi ini mengajak kita untuk tidak hanya berhenti pada apa yang dikatakan oleh teks, tetapi melangkah pada apa yang dilakukan oleh teks bagi pembacanya. Jika pembacaan *Sloka 35* melahirkan rasa sombong dan eksklusif, maka ada yang salah dalam proses penafsirannya. Sebaliknya, jika pembacaan teks tersebut melahirkan rasa damai dan keinginan untuk merangkul perbedaan, maka itulah fungsi transformatif dari sebuah kitab suci. Hermeneutika inklusif ini bertujuan untuk memulihkan daya sembuh agama bagi luka-luka sosial yang disebabkan oleh fanatisme. Dengan demikian, teks kuno ini tidak lagi dianggap sebagai fosil masa lalu, melainkan kompas hidup untuk navigasi badai klaim kebenaran. Sebagai penutup, peralihan dari eksklusivisme menuju inklusivisme melalui *Sloka 35* adalah sebuah revolusi kesadaran. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan keterikatan pada ego kelompok demi mencapai kebenaran yang lebih tinggi dan luas. Reinterpretasi ini memberikan landasan teologis yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan perbedaan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman. Kemenangan *Dharma* pada akhirnya adalah kemenangan ketika kita mampu melihat wajah Tuhan dalam setiap diri manusia yang berbeda dari kita. Inilah sumbangan terbesar *Sarasamuccaya* bagi pluralisme di Indonesia, yakni sebuah ajaran yang meneguhkan *sraddha* sekaligus meluaskan rasa cinta kasih kepada sesama tanpa batas-batas yang memisahkan identitas manusia (Yudari et al., 2022).

2.4. Implikasi dan Strategi Implementasi Nilai *Sarasamuccaya*

Implikasi pertama dari reinterpretasi *Sloka 35* *Sarasamuccaya* adalah perlunya transformasi dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah maupun di lingkungan keluarga (Soraya et al., 2025). Strategi implementasinya dimulai dengan menggeser orientasi pengajaran agama dari sekadar hafalan dogma menuju pembelajaran berbasis nilai etika universal. Pendidik harus mampu menghadirkan *Sloka 35* bukan sebagai jargon keunggulan satu agama, melainkan sebagai ajakan untuk melatih keteguhan karakter dalam berbuat baik. Dengan memperkenalkan konsep bahwa "kebenaran adalah kebajikan yang tak terkalahkan", peserta didik diajak untuk memiliki rasa percaya diri spiritual yang inklusif. Hal ini akan membentuk generasi muda yang tidak mudah terprovokasi oleh klaim kebenaran luar, karena mereka memahami bahwa esensi agama adalah perbuatan nyata yang bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan sekadar pengakuan identitas formal. Strategi selanjutnya berkaitan dengan peran tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam mendiseminasikan narasi inklusif melalui media sosial dan mimbar-mimbar keagamaan. Di tengah keriuhan digital yang sering kali memicu polarisasi, para tokoh agama perlu membanjiri ruang publik dengan konten-konten yang menekankan pada "kemenangan *Dharma*" sebagai kemenangan moral bersama. Implementasi praktisnya dapat berupa kampanye lintas iman yang menggunakan nilai-nilai *Sarasamuccaya* untuk membedah masalah-masalah sosial seperti kemiskinan atau kerusakan lingkungan. Ketika masyarakat melihat bahwa nilai-nilai Hindu Nusantara sangat kompatibel dengan perjuangan kemanusiaan universal, maka tembok eksklusivisme akan runtuh dengan sendirinya. Media sosial harus diubah dari medan pertempuran klaim kebenaran menjadi laboratorium dialog yang saling memperkaya antar-perspektif keagamaan yang berbeda namun tetap harmoni.

Secara sosiopolitik, implikasi dari pemikiran ini adalah penguatan modal sosial dalam bingkai moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah. Reinterpretasi *Sloka 35* memberikan landasan teologis bagi umat Hindu untuk terlibat aktif dalam dialog antar-keyakinan tanpa harus merasa kehilangan jati diri. Strategi implementasinya dapat dilakukan melalui pembentukan ruang-ruang pertemuan (*encounter spaces*) di tingkat akar rumput, seperti melalui kegiatan seni-budaya atau kerja bakti lintas agama (Sutrisno, 2023). Dalam ruang-ruang ini, nilai bahwa "kebenaran akan selalu menang" dibuktikan melalui keberhasilan komunitas dalam menjaga perdamaian meski berada di tengah perbedaan yang tajam. Keberhasilan dalam mempraktikkan toleransi menjadi bukti empiris bahwa *Dharma* (kebajikan) memang merupakan kekuatan yang tak terkalahkan oleh kebencian, sehingga memperkuat kohesi sosial secara organik di Indonesia. Dalam konteks penanganan konflik akibat klaim kebenaran, strategi ini menawarkan pendekatan resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Jika terjadi gesekan karena perbedaan keyakinan, *Sloka 35* dapat digunakan sebagai

instrumen mediasi untuk mengingatkan semua pihak bahwa tindakan merusak atau menghina kelompok lain sebenarnya adalah bentuk kekalahan diri sendiri di hadapan hukum *Dharma*. Implikasinya, penyelesaian konflik tidak hanya berhenti pada kesepakatan hukum formal, tetapi menyentuh transformasi kesadaran batin. Dengan menanamkan bahwa "kebenaran yang sejati bersifat cair dan menghidupkan seperti sungai", pihak-pihak yang bertikai diajak untuk melelehkan kekakuan ego masing-masing. Strategi ini memosisikan kearifan kuno sebagai solusi hidup (*living solution*) yang mampu meredakan ketegangan psikologis-teologis yang sering kali sulit dijangkau oleh pendekatan keamanan semata.

Pada tingkat individu, implementasi nilai ini menuntut adanya praktik "kesadaran reflektif" dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memegang teguh nilai *Sloka 35* akan lebih fokus pada pembenahan kualitas diri daripada menghakimi orang lain. Strateginya adalah dengan mempopulerkan praktik-praktik spiritualitas yang menekankan pada pelayanan (*sewa*) kepada sesama sebagai bentuk nyata dari menjalankan *Dharma*. Implikasinya, klaim kebenaran tidak lagi disuarakan lewat lisan, melainkan dibuktikan melalui ketulusan dalam membantu sesama tanpa memandang latar belakang agamanya (Hafiz et al., 2024). Ketika setiap individu berlomba dalam pengabdian, maka pluralisme di Indonesia tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi taman sari di mana berbagai warna kebajikan tumbuh bersama. Inilah puncak dari implementasi *Sarasamuccaya*, yakni sebuah masyarakat yang teguh dalam prinsip namun lembut dalam pergaulan sosial. Terakhir, strategi ini harus menyentuh ranah kebijakan publik dengan mendorong hadirnya regulasi yang melindungi kebebasan beragama berdasarkan prinsip keadilan universal. Para pembuat kebijakan dapat mengambil inspirasi dari filosofi *Sloka 35* bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan oleh kekuasaan manapun. Implikasinya adalah perlunya penghapusan segala bentuk peraturan daerah yang bersifat diskriminatif dan eksklusif yang hanya menguntungkan satu kelompok klaim kebenaran tertentu. Strategi implementasi ini memastikan bahwa negara hadir sebagai fasilitator bagi aliran sungai *Dharma* yang beragam, sehingga setiap warga negara merasa dilindungi hak-hak sipil dan spiritualnya. Dengan demikian, sinkronisasi antara teks suci kuno, reinterpretasi modern, dan kebijakan negara yang inklusif akan menjadi benteng kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih damai, adil, dan bermartabat di tengah keberagaman global.

3. Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa fenomena eksklusivisme dan klaim kebenaran (*truth claim*) yang menguat di Indonesia memerlukan solusi organik melalui reinterpretasi teks klasik Nusantara, yaitu *Sloka 35 Sarasamuccaya*. Melalui pendekatan hermeneutika, *Dharma* didekonstruksi dari sekadar identitas kelompok menjadi "Kebenaran Fungsional" universal yang memprioritaskan kemaslahatan manusia di atas ego sektarian. Esensi *sloka* ini menegaskan bahwa meskipun jalan dan ajaran agama beragam, semuanya bermuara pada satu tujuan kebenaran yang sama. Strategi implementasi nilai ini mencakup transformasi kurikulum pendidikan agama yang berbasis etika inklusif, penguatan narasi moderasi oleh tokoh agama di ruang digital, serta penghapusan regulasi daerah yang diskriminatif. Dengan menggeser paradigma dari "merasa benar sendiri" menjadi "berlomba dalam kebajikan", agama dikembalikan pada fungsinya sebagai pembebas dan pemersatu bangsa. Akhirnya, reinterpretasi ini memperkokoh nilai Pancasila dan prinsip *Vasudhaiva Kutumbakam*, di mana perbedaan dirayakan sebagai anugerah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan bermartabat.

Referensi

- Ashari, M. K., Faizin, M., & Shiddiq, J. (2023). Religious digital literacy of students in Indonesia and Malaysia. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 189-210.
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Religious and pro-violence populism in Indonesia: The rise and fall of a far-right Islamist civilisationist movement. *Religions*, 12(6), 397.
- Barus, E. P. & Sinaga, B. A. (2025). Radikalisme untuk Kristenisasi: Reinterpretasi Amanat Agung

- Matius 28: 16 – 20 dalam Penginjilan di Konteks Kemajemukan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(3), 286–303.
- Bourchier, D. M. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713-733.
- Butt, S. (2020). Constitutional recognition of “Beliefs” in Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 35(3), 450-473.
- Gara, I. W. (2020). Kajian Ajaran Etika dalam Kitab Sarasamuccaya. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(2), 23-39.
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R. A., & Mauliza, S. (2024). Toleransi beragama dalam masyarakat plural: Inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan peran media dalam membentuk sikap toleransi. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 120-130.
- Kajeng, I. N. et al. (1999). *Sārasamuccaya dengan Teks Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna*. Surabaya: Paramita.
- Kristianto, A. (2022). Teologi keagamaan kwok pui-lan: Dari hermeneutika asia menuju keadilan gender (Sebuah peta pemikiran teologi kontekstual asia). *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 8(2), 197-217.
- Manno, D. (2025). Gagalnya Pluralisme? Kajian Historis dan Teologis Menuju Paradigma Baru Moderasi Beragama. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 8(1), 85-103.
- Nasution, F. A., Irmayani, T., & Sazali, H. (2024). The Reality of Spirituality and the Challenge of Religious Freedom in Indonesia: Theological and Social Perspectives. *Pharos Journal of Theology*, 105(5).
- Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2024). Pluralisme agama-agama: Tantangan, peluang, dan perspektif teologis dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155-184.
- Pedersen, L. (2016). Religious pluralism in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 387-398.
- Semiring, W. M., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2023). The politicization of religion and polarization of hate in the 2018 North Sumatra regional head election Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 10(3).
- Sito, R. H., & Hakiem, N. (2025). Mediatization and hypermediation in digital religion and the transformation of Indonesian Muslim religious practices through social media usage. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(2), 133-150.
- Sofjan, D. (2020). Learning about religions: An Indonesian religious literacy program as a multifaith site for mutual learning. *Religions*, 11(9), 433.
- Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2019). Internet and Islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), 19.
- Soraya, S., Amalia, N., Mumtaazah, Y., Caenovea, C., & Zulkarnain, A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah/Sekolah. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v3i2.1277>.
- Susanto, N. H. (2019). Politicization of Religion and the Future of Democracy in Indonesia in Populism Theory. *Journal for the Study of Religions & Ideologies*, 18(54).
- Sutrisno, A. (2023). Peran Forum Kerukunan Pemuda Umat Beragama (FKPUB) dalam meningkatkan Moderasi Beragama berbasis Kearifan Lokal bagi masyarakat multi-agama di Madura. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 67-80.
- Wisarja, I. K., Aryani, N. W., & Suastini, N. N. (2022). *PELITA DHARMA: Keutamaan Dharma Menurut Sarasamuccaya*. Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 6(1), 69-81.
- Yudari, A. K. S., Karmini, N. W., & Seniwati, D. N. (2022). Reinterpretasi Makna Budaya Sungkem Sebagai Ajaran Budi Pekerti Dalam Sloka Sarasamuccaya. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(3), 173-187.